

# PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu,  
Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya  
Kabupaten Kubu Raya

e-mail : [pa.sungairaya@gmail.com](mailto:pa.sungairaya@gmail.com)



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung,  
Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya**

**Telp. 0561-6718903 Fax. 0561-6717768**

**e-mail : pa.sungairaya@gmail.com**

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungai Raya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungai Raya, 31 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

GALIH TRIATMOJO, S.E.  
NIP. 198102142006041003

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan .....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan .....	5
II. Neraca Perbandingan.....	6
III. Laporan Operasional .....	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	9
A. Penjelasan Umum .....	9
A.1. Dasar Hukum.....	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungai Raya .....	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
A.4. Basis Akuntansi .....	12
A.5. Dasar Pengukuran .....	12
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan .....	20
B.2. Belanja.....	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca .....	23
C.1. Aset Lancar.....	23
C.2. Aset Tetap .....	25
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	28
C.4. Aset Lainnya .....	28
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	30
C.6. Ekuitas.....	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional .....	31
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	31
D.2. Beban Pegawai.....	31

D.3.	Beban Persediaan .....	32
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	32
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	32
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	33
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	33
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	33
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	34
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	34
D.11.	Beban Lain-lain.....	34
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	34
D.13.	Pos Luar Biasa .....	35
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	36
E.1.	Ekuitas Awal .....	36
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	36
E.3.	Penyesuaian Nilai Aset.....	36
E.4.	Koreksi Nilai Persediaan .....	36
E.5.	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	36
E.6.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	36
E.7.	Koreksi Lain-Lain.....	36
E.8.	Anggaran Yang Lalu.....	36
E.9.	Transaksi Antar Entitas.....	36
E.10.	Ekuitas Akhir.....	36
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	38
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	38
F.2.	Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI .....	38
F.3.	Pengungkapan Lain-lain .....	38

**LAMPIRAN**

Laporan-Laporan Pendukung

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

## Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan T A 2018.....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	2
Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	5
Tabel 4 Neraca per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	6
Tabel 5 Laporan Operasional per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	7
Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	8
Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang .....	15
Tabel 8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap .....	17
Tabel 9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	18
Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBp per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018 .....	20
Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2019 .....	20
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	21
Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	21
Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	22
Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	22
Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	23
Tabel 17 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	23
Tabel 18 Rincian Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> ) per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	24
Tabel 19 Rincian Persediaan per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	24
Tabel 20 Rincian Aset Tetap per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	25
Tabel 21 Rincian Saldo Tanah.....	25
Tabel 22 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin.....	26
Tabel 23 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan .....	26
Tabel 24 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	27
Tabel 25 Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	27
Tabel 26 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	28
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	28

Tabel 28 Mutasi Aset Tak Berwujud .....	29
Tabel 29 Mutasi Aset Lain-Lain.....	29
Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	30
Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga.....	30
Tabel 32 Perbandingan Rincian Pendapatan per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	31
Tabel 33 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	31
Tabel 34 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	32
Tabel 35 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	32
Tabel 36 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	33
Tabel 37 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	33
Tabel 38 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018.....	34
Tabel 39 Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Des 2019 dan 31 Des 2018....	35
Tabel 40 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas.....	37
Tabel 41 Rincian Revisi Anggaran per 31 Des 2019.....	39

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Raya, 31 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

GALIH TRIATMOJO, S.E.  
NIP.198102142006041003





## Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 3.105.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.824.429.784 atau mencapai 98,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.871.446.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2019			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	0	3.105	0%	0	0	0%
Belanja Negara	2.871.446.000	2.824.429.784	98,36%	0	0	0%

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 690.708.661, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 4.063.000, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 686.645.661, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 1.184.802, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 1.184.802 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 689.523.859, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 689.523.859 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**  
(dalam rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	4.063.000	0	4.063.000	0%
Aset Tetap	686.645.661	0	686.645.661	0%
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>690.708.661</b>	<b>0</b>	<b>690.708.661</b>	<b>0%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	1.184.802	0	1.184.802	0%
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>1.184.802</b>	<b>0</b>	<b>1.184.802</b>	<b>0%</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	689.523.859	0	689.523.859	0%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>689.523.859</b>	<b>0</b>	<b>689.523.859</b>	<b>0%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>690.708.661</b>	<b>0</b>	<b>690.708.661</b>	<b>0%</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.105, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.562.256.715, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2.562.253.610). Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 99.500 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 2.562.154.110).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 2.562.154.110) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.251.677.969 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 689.523.859.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya

hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## I. LRA Perbandingan

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1						
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	3.105	0%	0	0	0%
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	3.105	0%	0	0	0%
B. Belanja Negara	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1	2.012.866.000	1.997.466.350	99,23%	0	0	0%
2. Belanja Barang	B.2.2	433.580.000	428.436.934	98,81%	0	0	0%
3. Belanja Modal	B.2.3	425.000.000	398.526.500	93,77%	0	0	0%
Jumlah Belanja Negara		2.871.446.000	2.824.429.784	98,36%	0	0	0%

## II. Neraca Perbandingan

Tabel 4. Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)	C.1.2	0	0
Persediaan	C.1.3	4.063.000	0
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>4.063.000</b>	<b>0</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2.1	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.2	875.784.690	0
Gedung dan Bangunan	C.2.3	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(189.139.029)	0
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>686.645.661</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>690.708.661</b>	<b>0</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	1.184.802	0
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>1.184.802</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.184.802</b>	<b>0</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.6	689.523.859	0
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>689.523.859</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>690.708.661</b>	<b>0</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

### III. Laporan Operasional

Tabel 5. Laporan Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	3.105	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.105</b>	<b>0</b>
Beban			
Beban Pegawai	D.2	1.997.466.350	0
Beban Persediaan	D.3	21.601.200	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	313.338.043	0
Beban Pemeliharaan	D.5	70.498.993	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20.220.000	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	139.132.129	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-Lain	D.11	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>2.562.256.715</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(2.562.253.610)</b>	<b>0</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
D.12			
Surplus / (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Surplus / (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus / (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		321.500	0
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		222.000	0
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>99.500</b>	<b>0</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
D.13			
Beban Luar Biasa		0	0
<b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>		<b>(2.562.154.110)</b>	<b>0</b>

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIF – LO	E.2	(2.562.154.110)	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	0	0
Koreksi Lain-Lain	E.7	0	0
Anggaran Yang Lalu	E.8	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	3.251.677.969	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.9.1	2.824.429.784	0
Diterima dari Entitas Lain	E.9.2	(3.105)	0
Transfer Keluar	E.9.3	0	0
Transfer Masuk	E.9.4	427.251.290	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		689.523.859	0
EKUITAS AKHIR	E.10	689.523.859	0

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapanta Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungai Raya

Visi Pengadilan Agama Sungai Raya merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 s.d 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Sungai Raya. Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan.
2. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sungai Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Sungai Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan karir pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya di bidang tugasnya masing-masing.
- b. Meningkatnya minat dan kemauan pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga berorientasi kepada hasil (indikator persentase peningkatan etos kerja).
- d. Meningkatnya keseragaman pola administrasi dan manajemen peradilan di semua lingkungan peradilan.
- e. Meningkatnya akurasi data dan statistik, mulai dari penyusunan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, termasuk pemanfaatan teknologi dengan penerapan aplikasi yang lebih canggih.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:



- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusunan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah,
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP),
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<b>Software Komputer</b>	4
<b>Franchise</b>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7.) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Realisasi  
Pendapatan Rp.  
3.105

### B.1 Pendapatan

#### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.105 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Nilai ini diperoleh dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) di mana terjadi kesalahan sistem pada Bank yang memberikan bunga bank pada Rekening Pemerintah.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan	
				Rp	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3.105	0	3.105	0%
<b>Jumlah Pendapatan Netto</b>		<b>3.105</b>	<b>0</b>	<b>3.105</b>	<b>0%</b>

Realisasi  
Belanja  
Negara Rp.  
2.824.429.784

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Sungai Raya pada periode 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.824.429.784 atau 98,36% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.871.446.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2019  
(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	2.012.866.000	1.997.466.350	99,23%
52	Belanja Barang	433.580.000	428.436.934	98,81%
53	Belanja Modal	425.000.000	398.526.500	93,77%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>2.871.446.000</b>	<b>2.824.429.784</b>	<b>98,36%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2019 belum bisa dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena satuan kerja Pengadilan Agama Sungai Raya baru pertama kali menerima DIPA di Tahun 2019 ini.

Adapun perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018 (dalam rupiah)**

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / (Penurunan)	
		TA 2019	TA 2018	Rp	%
51	Belanja Pegawai	1.997.466.350	0	1.997.466.350	0%
52	Belanja Barang	428.436.934	0	428.436.934	0%
53	Belanja Modal	398.526.500	0	398.526.500	0%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>		<b>2.824.429.784</b>	<b>0</b>	<b>2.824.429.784</b>	<b>0%</b>

*Belanja Pegawai Rp. 1.997.466.350*

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.997.466.350 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Pegawai ini telah terserap 99,23% dari total anggaran. Adapun perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 13. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 (dalam rupiah)**

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Gaji Pokok PNS	823.995.140	0	823.995.140	0%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.343	0	14.343	0%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	63.166.250	0	63.166.250	0%
Belanja Tunj. Anak PNS	17.702.016	0	17.702.016	0%
Belanja Tunj. Struktural PNS	24.320.000	0	24.320.000	0%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	692.645.000	0	692.645.000	0%
Belanja Tunj. PPh PNS	81.973.185	0	81.973.185	0%
Belanja Tunj. Beras PNS	45.841.860	0	45.841.860	0%
Belanja Uang Makan PNS	165.211.000	0	165.211.000	0%
Belanja Tunj. Umum PNS	19.330.000	0	19.330.000	0%
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	63.450.000	0	63.450.000	0%
Realisasi Belanja Pegawai Bruto	1.997.648.794	0	1.997.648.794	0%
Pengembalian	(182.444)	0	(182.444)	0%
Realisasi Belanja Pegawai Netto	1.997.466.350	0	1.997.466.350	0%

## B.2.2 Belanja Barang

Belanja  
Barang Rp.  
428.436.934

Realisasi Belanja Barang sampai dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 428.436.934 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Barang ini telah terserap sebesar 98,81% dari total anggaran. Adapun perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Barang Operasional	286.117.771	0	286.117.771	0%
Belanja Barang Non Operasional	3.000.000	0	3.000.000	0%
Belanja Jasa	51.600.170	0	51.600.170	0%
Belanja Pemeliharaan	70.498.993	0	70.498.993	0%
Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000	0	17.220.000	0%
Realisasi Belanja Barang Bruto	428.436.934	0	428.436.934	0%
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Barang Netto	428.436.934	0	428.436.934	0%

## B.2.3 Belanja Modal

Belanja  
Modal  
Rp. 398.526.500

Realisasi Belanja Modal sampai dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 398.526.500 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Persentase serapan anggarannya mencapai 93,77%. Adapun perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018  
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.526.500	0	398.526.500	0%
Realisasi Belanja Modal Bruto	398.526.500	0	398.526.500	0%
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Modal Netto	398.526.500	0	398.526.500	0%



## C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

### C.1 Aset Lancar

Aset Lancar  
Rp. 4.063.000

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.063.000 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sungai Raya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Belanja Dibayar Di Muka (prepaid)	0	0
3	Persediaan	4.063.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4.063.000</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp. 0,00

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 17. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belanja Dibayar  
Dimuka (Prepaid)  
Rp.0,00

#### C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 18. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Belanja Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.3 Persediaan

Persediaan Rp.  
4.063.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.063.000 dan Rp. 0,00. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Persediaan  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	4.063.000	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan Lainnya	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4.063.000</b>	<b>0</b>

Nilai persediaan di atas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan tanggal 31 Desember 2019. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp. 0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

Aset Tetap  
Rp. 686.645.661

## C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 686.645.661 dan per periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada Pengadilan Agama Sungai Raya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 20. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018**  
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	875.784.690	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>875.784.690</b>	<b>0</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(189.139.029)</b>	<b>0</b>
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>686.645.661</b>	<b>0</b>

Tanah  
Rp. 0,00

### C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Sungai Raya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0.

Rincian Aset Tetap berupa tanah pada Pengadilan Agama Sungai Raya disajikan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 21. Rincian Saldo Tanah**  
(dalam rupiah)

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>0</b>
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Peralatan dan  
Mesin  
Rp.  
686.645.661

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp. 606.356.000 dan Rp. 0,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 22. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	398.526.500
Transfer Masuk	477.258.190
Jumlah Mutasi Tambah	875.784.690
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	875.784.690
Akumulasi Penyusutan	(189.139.029)
Nilai Buku	686.645.661

Mutasi tambah yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungai Raya berupa:

1. Pembelian 1 unit Kendaraan Roda 4 senilai Rp. 264.500.000,-
2. Pembelian 2 unit Kendaraan Roda 2 senilai Rp. 35.500.000,-
3. Pembelian 3 unit Laptop senilai Rp. 39.000.000,-
4. Pembelian 1 set Perangkat Jaringan Internet senilai Rp. 59.526.500,-
5. Transfer Masuk dari Pengadilan Tinggi Agama Pontianak senilai Rp. 292.614.000,- dengan BAST Nomor : W14-A/378/PL.07/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019.
6. Transfer Masuk dari Pengadilan Agama Mempawah senilai Rp. 18.582.000,- dengan BAST Nomor : W14-A3/570/PL.07/IV/2019 Tanggal 23 April 2019.
7. Transfer Masuk dan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI berupa Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi senilai Rp. 170.902.190,- dengan BAST Nomor : 487/BUA.7/BAST/BMN-BUN/12/2019 Tanggal 21 Desember 2019.

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan  
Bangunan  
Rp.0,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 23. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp.0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.0,00

## C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan  
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
(Rp.189.139.029)

## C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah (Rp. 189.139.029,-) dan Rp.0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	875.784.690	(189.139.029)	686.645.661
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>875.784.690</b>	<b>(189.139.029)</b>	<b>686.645.661</b>

Aset Tak  
Berwujud  
Rp.0,00

## C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Sungai Raya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud  
(dalam rupiah)**

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.4.2 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain  
Rp.0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00. Tidak ada mutasi aset lain-lain pada Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2019.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Sungai Raya serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain  
(dalam rupiah)**

Saldo per 31 Desember 2018	0
Pembelian	0
Jumlah Mutasi Tambah	0
Transfer Keluar	0
Jumlah Mutasi Kurang	0
Jumlah Mutasi	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku	0

### C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi  
Penyusutan  
dan  
Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp.0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya tersebut merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (dalam rupiah)**

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	
2	Aset Lain-Lain	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 1.184.802*

### C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 1.184.802 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

**Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga (dalam rupiah)**

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Langganan Internet	0	
2	Belanja Langganan Listrik	0	
3	Belanja Langganan Telepon	1.184.802	
4	Belanja Langganan Air	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>1.184.802</b>	

*Uang Muka dari KPPN Rp.0,00*

### C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 0,00 dan Rp.0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.6 Ekuitas

*Ekuitas Rp. 689.523.859*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 689.523.859 dan Rp.0,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan



kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP  
Rp. 3.105

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Rp. 3.105 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 32. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (dalam rupiah)**

Uraian Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3.105	0	3.105	0%
<b>Total Pendapatan</b>	<b>3.105</b>	<b>0</b>	<b>3.105</b>	<b>0%</b>

Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa lembaga keuangan (jasa giro) yang diakibatkan kesalahan sistem pada Bank yang memberikan bunga pada rekening giro pemerintah yang statusnya sudah TNP (Treasury Notional Pooling).

### D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai  
Rp.  
1.997.466.350

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.997.466.350 dan Rp. 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 33. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (dalam rupiah)**

Uraian	Beban Pegawai		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Gaji Pokok PNS	823.995.140	0	823.995.140	0%
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.899	0	11.899	0%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63.166.250	0	63.166.250	0%
Beban Tunj. Anak PNS	17.702.016	0	17.702.016	0%
Beban Tunj. Struktural PNS	24.320.000	0	24.320.000	0%
Beban Tunj. Fungsional PNS	692.645.000	0	692.645.000	0%
Beban Tunj. PPh PNS	81.973.185	0	81.973.185	0%
Beban Tunj. Beras PNS	45.841.860	0	45.841.860	0%
Beban Uang Makan PNS	165.211.000	0	165.211.000	0%
Beban Tunj. Umum PNS	19.150.000	0	19.150.000	0%
Beban Tunj. Kemahalan Hakim	63.450.000	0	63.450.000	0%
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>1.997.466.350</b>	<b>0</b>	<b>1.997.466.350</b>	<b>0%</b>

Beban  
Persediaan  
Rp. 21.601.200

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.601.200 dan Rp. 0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Persediaan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	21.601.200	0	21.601.200	0%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0%
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>21.601.200</b>	<b>0</b>	<b>21.601.200</b>	<b>0%</b>

Beban Barang  
dan Jasa  
Rp. 313.338.043

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 313.338.043 dan Rp. 0,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa ialah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Barang dan Jasa		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Keperluan Perkantoran	192.653.071	0	192.653.071	0%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600.000	0	600.000	0%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.960.000	0	48.960.000	0%
Beban Barang Operasional Lainnya	18.340.000	0	18.340.000	0%
Beban Langganan Listrik	21.800.170	0	21.800.170	0%
Beban Langganan Telepon	1.184.802	0	1.184.802	0%
Beban Sewa	29.800.000	0	29.800.000	0%
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>313.338.043</b>	<b>0</b>	<b>313.338.043</b>	<b>0%</b>

## D.5 Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan Rp.  
70.498.993

Beban pemeliharaan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 70.498.993 dan Rp. 0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 36. Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (dalam rupiah)**

Uraian	Beban Pemeliharaan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.999.250	0	39.999.250	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.499.743	0	30.499.743	0%
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>70.498.993</b>	<b>0</b>	<b>70.498.993</b>	<b>0%</b>

## D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan Dinas  
Rp. 20.220.000

Beban Perjalanan Dinas yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.220.000 dan Rp. 0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 37. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (dalam rupiah)**

Uraian	Beban Perjalanan Dinas		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	20.220.000	0	20.220.000	0%
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>20.220.000</b>	<b>0</b>	<b>20.220.000</b>	<b>0%</b>

## D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang  
Untuk Diserahkan  
Kepada  
Masyarakat  
Rp. 0,00

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

Beban Bantuan Sosial  
Rp. 0,00

## D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang/jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp. 139.132.129

## D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 139.132.129 dan Rp. 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (dalam rupiah)

Uraian	Beban Penyusutan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.132.129	0	139.132.129	0%
<b>Total Beban Penyusutan</b>	<b>139.132.129</b>	<b>0</b>	<b>139.132.129</b>	<b>0%</b>

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Rp.0,00

## D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Beban Lain-Lain  
Rp.0,00

## D.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Jumlah Beban Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Surplus/(Defisit)  
dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp.(99.500,00)

## D.12 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  
(dalam rupiah)

Uraian	Beban Penyusutan		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	321.500	0	321.500	0%
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	222.000	0	222.000	0%
Total Beban Penyusutan	(99.500)	0	(99.500)	0%

Beban Pos Luar  
Biasa  
Rp.0,00

## D.13 Beban Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Beban Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

## E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal  
Rp. 0,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.2 Surplus/Defisit LO

*Surplus/Defisit  
LO Rp.  
(2.562.154.110)*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. (2.562.154.110) dan Rp. 0,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

### E.3 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp. 0,00*

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.4 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp. 0,00*

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp. 0,00*

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai  
Aset Tetap Non  
Revaluasi  
Rp. 0,00*

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.7 Koreksi Lain-lain

*Koreksi lain-lain  
Rp. 0,00*

Jumlah Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

### E.8 Anggaran Yang Lalu

*Anggaran Yang  
Lalu  
Rp. 0,00*

Jumlah Anggaran Yang Lalu untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp.  
3.251.677.969

## E.9 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 3.251.677.969 dan Rp. 0,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 40. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.824.429.784
2	Diterima dari Entitas Lain	(3.105)
3	Transfer Keluar	0
4	Transfer Masuk	427.251.290
	<b>Jumlah</b>	<b>3.251.677.969</b>

Ditagihkan ke  
Entitas Lain  
Rp.  
2.824.429.784

### E.9.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019 nilai DKEL sebesar Rp. 2.824.429.784.

Diterima dari  
Entitas Lain  
Rp. (3.105)

### E.9.2 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019 nilai DDEL sebesar Rp. (3.105).

Transfer Keluar  
Rp. 0,00

### E.9.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

Transfer  
Masuk  
Rp.  
427.251.290

### E.9.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 427.251.290.

Ekuitas Akhir  
Rp.  
689.523.859

## E.10 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah



masing-masing sebesar Rp. 689.523.859 dan Rp. 0,00.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2019 pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2019.

### F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak ada temuan dari BPK RI selama Tahun Anggaran 2019.

### F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya adalah:
  - 1) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 0071-01-002997-30-1 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964 telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN Pontianak nomor S-4755/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
  - 2) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 0071-01-002999-30-3 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 403425, telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN Pontianak nomor S-4755/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 14 Desember 2018, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.
  - 3) PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Kas Kuala Dua, Nomor Rekening 2018110997 a.n. RPL 042 PDT PA SUNGAI RAYA UTK PERKARA, telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari KPPN Pontianak nomor S-3746/WPB.17/KP.0104/2018 tanggal 05 November 2018 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.433.000,00.

- 4) Sedangkan Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya dan telah ditutup tidak ada.

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2019 bernomor: DIPA-005.01.2.401964/2019 tanggal 05 Desember 2018 berjumlah sebesar Rp. 1.969.959.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 dilakukan revisi anggaran oleh Eselon I Mahkamah Agung sehingga pagu DIPA bertambah menjadi Rp. 2.171.259.000,00 (Dua milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) penambahan anggaran dengan kode BA.BUN ini mengalokasikan tambahan anggaran langganan internet dan belanja modal alat pengolah data serta jaringan internet bagi satuan kerja baru untuk menunjang sarana dan prasarana implementasi e-court. Terakhir dilakukan revisi pada tanggal 02 Desember 2019 berupa pergeseran anggaran antar satker untuk menyelesaikan pagu minus Belanja Pegawai. Adapun rincian perubahan anggaran tiap-tiap akun yang direvisi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 41. Rincian Revisi DIPA per 31 Desember 2019**  
(dalam rupiah)

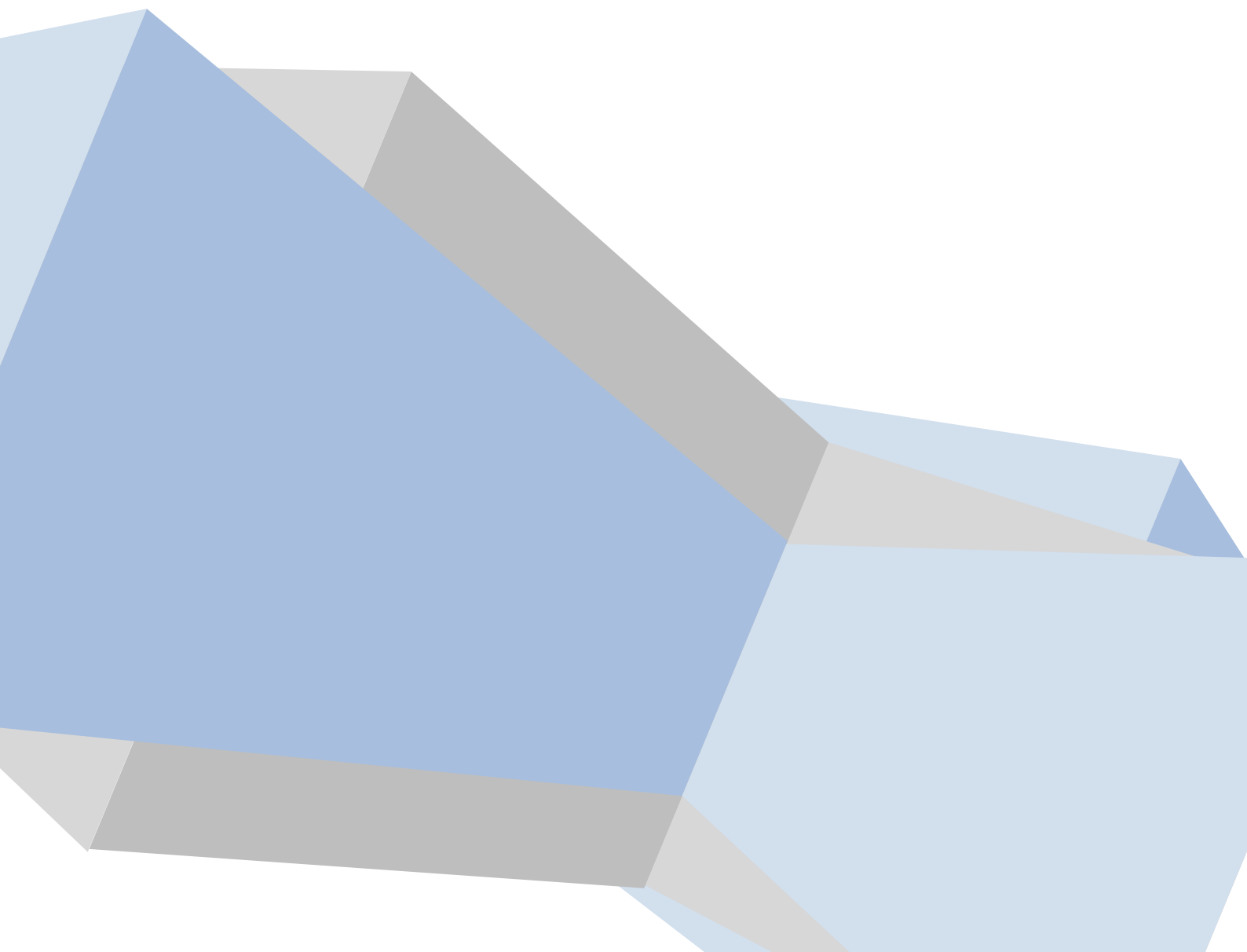
Program dan Kegiatan	Kode Akun	DIPA Awal	Revisi 1 Tgl. 29 Mei 2019	Revisi 7 Tgl. 02 Des 2019
<b>005.01.01</b>				
<b>1066.970</b>	524111	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>1066.994</b>	511111	545.662.000	545.662.000	824.765.000
	511119	16.000	16.000	16.000
	511121	53.240.000	53.240.000	63.358.000
	511122	18.099.000	18.099.000	17.906.000
	511123	26.130.000	26.130.000	24.320.000
	511124	260.800.000	260.800.000	692.645.000
	511125	89.587.000	89.587.000	84.474.000
	511126	62.327.000	62.327.000	45.998.000
	511129	166.320.000	166.320.000	176.534.000
	511151	11.498.000	11.498.000	19.400.000
	511157	85.000.000	85.000.000	63.450.000
	521111	117.600.000	193.900.000	196.255.000
	521119	1.500.000	1.500.000	18.340.000

	521811	13.500.000	13.500.000	25.565.000
	521114	12.000.000	12.000.000	600.000
	522111	18.000.000	18.000.000	21.900.000
	522112	12.000.000	12.000.000	120.000
	522113	6.000.000	6.000.000	120.000
	523111	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	523121	36.500.000	36.500.000	30.500.000
	521115	48.960.000	48.960.000	48.960.000
	524111	17.220.000	17.220.000	17.220.000
	522141	25.000.000	25.000.000	31.000.000
<b>005.01.02</b>				
<b>1071.951</b>	532111	300.000.000	425.000.000	425.000.000
<b>Total</b>		<b>1.969.959.000</b>	<b>2.171.259.000</b>	<b>2.871.446.000</b>

3. Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor: W14-A11/188/KP.00.2/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, serta Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor: W14-A11/748/KU.01/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Perubahan Susunan Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Galih Triatmojo, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Herry Andrianto, ST.
Pejabat Penandatangan SPM	: Hardiyanto, S.Kom.
Staf Pengelola/PPABP	: Roni Kurniawan, S.Kom.
Bendahara Pengeluaran	: Istiqamah
Bendahara Penerimaan	: Luluk Septian Dini, S.Psi.

# DAFTAR LAMPIRAN



**LAMPIRAN A.1**  
**TABEL PENYUSUTAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D. PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOTAL AK. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
132111	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>124</b>	<b>880.624.690</b>	<b>0</b>	<b>140.100.129</b>	<b>50.490.900</b>	<b>190.591.029</b>	<b>690.033.661</b>
<b>3.02.01</b>	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	3	300.000.000	0	42.857.142	0	42.857.142	257.142.858
<b>3.05.01</b>	ALAT KANTOR	Buah	10	49.030.000	0	9.806.000	4.903.000	14.709.000	34.321.000
<b>3.05.02</b>	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	73	156.266.000	0	27.536.800	32.350.400	59.887.200	96.378.800
<b>3.06.01</b>	ALAT STUDIO	Buah	4	10.136.000	0	1.013.600	0	1.013.600	9.122.400
<b>3.10.01</b>	KOMPUTER UNIT	Buah	14	163.389.600	0	27.648.700	7.225.000	34.873.700	128.515.900
<b>3.10.02</b>	PERALATAN KOMPUTER	Buah	20	201.803.090	0	31.237.887	6.012.500	37.250.387	164.552.703
	<b>TOTAL</b>		<b>124</b>	<b>880.624.690</b>	<b>0</b>	<b>140.100.129</b>	<b>50.490.900</b>	<b>190.591.029</b>	<b>690.033.661</b>

**LAMPIRAN A.2**  
**TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/ Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
TIDAK ADA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan																

**LAMPIRAN A.3**  
**TABEL DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
TIDAK ADA DAFTAR HIBAH LANGSUNG							